

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Gambaran Umum Inflasi Kabupaten Blitar Inflasi yang wajar dan stabil akan menciptakan ekonomi yang berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilisasi harga kebutuhan pokok juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk melakukan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. TPID Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya diantaranya penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPID secara berkala agar seluruh TPID di Kabupaten Blitar mempunyai komitmen menstabilkan harga. Hal tersebut sesuai dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Blitar, Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing. Angka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar tahun 2020 senilai 24.945,40 milyar rupiah. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Kediri. Sumbangan sektor tersebut pada PDRB Kabupaten Kediri mencapai 29,57% persen. Pada peringkat kedua adalah sektor Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan sumbangan 18,08% persen. Industri Pengolahan menempati urutan ketiga dan menyumbangkan andil sebesar 13,72% persen. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 digunakan untuk menggambarkan perkembangan PDRB dan komponennya. Berdasarkan angka PDRB ADHK pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar tahun 2020 adalah 2,43%. Pertumbuhan PDRB tertinggi sebesar 3,05%, adalah pada sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Ekonomi Kabupaten Blitar bertumpu pada sektor pertanian. Potensi pertanian yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sangat besar. Kabupaten Blitar juga merupakan eksportir hasil pertanian dan peternakan terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Blitar juga melakukan terobosan untuk menjadikan produk pertanian lebih bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Atau dengan kata lain mengubah wajah Kabupaten Blitar dari Agriculture being Agroindustry. Selain itu, potensi ekonomi juga harus tereksplorasi secara maksimal. Termasuk kawasan wisata juga harus mulai digarap secara baik PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) rata-rata 3 tahun terakhir secara umum pada struktur ekonomi Kabupaten Blitar didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 32,85%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18,49%; Industri Pengolahan 18,14%; Industri Pengolahan 13,63%; dan Konstruksi 9,26%. Sedangkan untuk potensi Kabupaten Blitar seperti cabai rawit mengalami surplus sekitar 376.579 ton, kubis surplus sekitar 11.806 ton dan tomat 6.850 ton. Sementara untuk produksi telur Kabupaten Blitar mencapai 169.388.886 dengan populasi mencapai 17.076.200 ekor. Laju Indeks Implisit Menurut Lapangan Usaha (Persen) Sektor PDRB 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,24 2,14 1,23 Pertambangan dan Penggalan 6,59 2,27 2,46 Industri Pengolahan 3,11 2,22 1,63 Pengadaan Listrik dan Gas 4,25 1,57 -2,16 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,91 -1,23 0,34 Konstruksi 0,85 -2,49 0,29 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,96 2,63 1,08 Transportasi dan Pergudangan 1,9 1,99 0,27 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,94 1,74 1,9 Informasi dan Komunikasi 0,02 1,2 0,23 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,78 0,69 0,41 Real Estate 4,33 2,72 1,68 Jasa Perusahaan 4,13 2,42 2,65 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,07 6,62 4,15 Jasa Pendidikan 1,12 1,85 1,19 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,16 1,91 0,79 Jasa lainnya 3,47 1,17 1,52 PDRB 2,81 1,62 1,16 Dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berasal dari Kabupaten Blitar sebagai penghasil telur ayam ras. Untuk produksi telur Kabupaten Blitar mencapai 169.388.886 dengan populasi ayam mencapai 17.076.200 ekor. Hal ini mengalami peningkatan hampir 0,82% dari tahun sebelumnya,

sehingga mempengaruhi produksi telur pada saat itu. Peran aktif TPID Kabupaten Blitar secara aktif melakukan berbagai upaya dalam rangka meminimalkan gejolak harga. Langkah penguatan koordinasi telah dilakukan dalam berbagai forum koordinasi antara lain undangan Rapat mengenai penindak lanjutan Program Intermediatory Supply-Demand yang ditetapkan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur; Rapat Koordinasi Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID; Rapat Koordinasi Penjajakan Awal Kerjasama Antar Daerah (KAD) Komoditas Telur Ayam Ras Antara TPID Kab. Blitar Dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara dan kota Tarakan). TPID Kabupaten Blitar mengikuti video conference di Kantor Pemkab Kanigoro, Senin dengan pemerintah pusat terkait penandatanganan kerjasama Penyertaan Modal Asing (PMA)/Penyertaan Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Juga dilakukan rapat koordinasi guna menindaklanjuti Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Selain itu, TPID Kabupaten Blitar juga telah menyepakati beberapa program kerja strategis bersama yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan, pengembangan klaster ketahanan pangan dan pemantauan harga ketersediaan pasokan komoditas serta pemantauan jalur distribusi komoditas juga menjadi program kerja TPID Kabupaten Blitar. Selain hal tersebut, juga dilakukan pemanfaatan kajian dan informasi serta pengendalian ekspektasi masyarakat agar inflasi selalu terjaga. Prediksi kondisi inflasi kedepan karena faktor pendorong yang antara lain akan meningkatnya permintaan karena kegiatan PPKM dan momen-momen hari raya keagamaan. Selain itu juga karena adanya faktor penghambat yakni kecukupan pasokan dan stok komoditas volatile foods, terutama beras, pengiriman pasokan beras Jawa Timur secara langsung ke luar daerah dari sentra produksi sehingga tidak berdampak positif pada penambahan suplai di dalam Jawa Timur dan juga akan adanya kenaikan tarif angkutan umum sehubungan dengan libur long weekend dan keagamaan. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan berkala terhadap kelancaran pasokan dan ketersediaan stok beras di gudang-gudang, melakukan identifikasi terhadap karakteristik komoditas daerah sekaligus memetakan surplus defisit serta resikonya, meningkatkan sinergi antar SKPD dan instansi serta mengalokasi anggaran dalam pengendalian harga juga tetap mengkomunikasikan hasil pemantauan dan informasi lainnya kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi. Pencapaian pertumbuhan ekonomi juga harus disertai pengendalian inflasi, mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pengendalian inflasi serta agar mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah untuk stabilisasi harga. Selain itu perlu dibuat kebijakan dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Terkendalnya inflasi tercermin dari stabilnya harga pada berbagai komoditas. Berdasarkan data SISKAPERPABO sampai dengan akhir Maret 2021 di berbagai komoditas yaitu: A. Beras Komoditas beras menunjukkan trend harga yang relatif stabil sejalan dengan panen di beberapa sentra produksi beras. Harga beras Mentik sampai dengan Triwulan I ini kisaran Rp. 11.000,- yang artinya, tidak mengalami kenaikan apapun. Sedangkan beras IR 64 mengalami kenaikan mencapai 9.625, karena memang beras jenis ini cukup dimintai pasar. B. Minyak Goreng Komoditas minyak goreng baik untuk minyak goreng bermerk dan minyak goreng curah menunjukkan trend yang relatif menurun selama Triwulan I 2021. Hal ini dikarenakan sektor industri makanan olahan mengalami penurunan permintaan. Beberapa konsumen cenderung melakukan pembatasan dengan lebih mengonsumsi makanan siap saji akibat PPKM. C. Daging Sapi Murni Komoditas daging sapi menunjukkan trend yang relatif turun di level harga Rp. 107.500/kg. Dalam masa Januari - Maret konsumen makanan olahan sebagai pengguna daging cenderung melakukan pembatasan sosial bersamaan dengan konsumen makanan olahan itu sendiri. D. Daging Ayam Komoditas daging ayam ras selama Triwulan I

2021 menunjukkan trend harga yang cenderung menurun. Penyebab utamanya yaitu dari sisi supply karena adanya permintaan yang rendah. Sedangkan daging ayam kampung cenderung stabil, karena umumnya konsumen daging ayam kampung cenderung konstan. E. Telur Telur sebagai produksi andalan kabupaten Blitar memang di periode Januari-Maret cenderung stabil. Meski di tingkat produsen sempat terjadi gejolak, namun kondisinya masih terkendali. Komoditas telur ayam ras selama Triwulan I 2021 menunjukkan trend harga yang cenderung menurun. Penyebab utamanya yaitu dari sisi supply karena adanya permintaan yang rendah sebagai akibat geliat PPKM mikro. Sedangkan ayam kampung cenderung stabil. F. Aneka Cabai Pada Triwulan I 2021, harga cabai baik cabai biasa dan cabai rawit sejak awal bulan Januari sampai dengan akhir Maret mengalami penurunan karena adanya panen sehingga terjadi kelebihan pasokan. G. Aneka Bawang Harga komoditas bawang merah dan bawang putih di Triwulan I 2021 cenderung meningkat. Kenaikan harga kedua komoditas tersebut disebabkan oleh keterbatasan pasokan. Sampai dengan Maret 2021 angka panen bawang putih di Kabupaten Blitar hanya mencapai 200 ton dengan realisasi panen 14 ha. Sedangkan angka panen bawang merah di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Brebes (sentra produksi utama) juga sangat terbatas. Di Kabupaten Nganjuk, sebagian besar lahan masih ditanami padi, demikian pula di Kabupaten Brebes dimana panen telah berlangsung pada Januari-Februari 2020. Sementara itu, keterbatasan pasokan bawang putih dipengaruhi oleh penurunan volume impor dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di tengah ketergantungan terhadap pasokan impor yang masih tinggi. Kondisi tersebut diperparah oleh curah hujan yang masih tinggi sehingga stok bawang putih lebih cepat membusuk.

Memperhatikan perkembangan harga berbagai komoditas hingga minggu I April 2020, dan beberapa indikator makroekonomi terkini, maka inflasi Triwulan II 2020 diperkirakan lebih rendah daripada capaian Triwulan I 2020. Beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi capaian inflasi April 2020 a.l. penurunan konsumsi dan adanya pandemi covid 19. Meskipun demikian, terjaganya ekspektasi masyarakat dan intensitas kegiatan TPID di Kabupaten Blitar diperkirakan mampu menahan beberapa risiko tersebut.

2. Potensi Risiko Inflasi ke Depan

A. Inflasi

Inti Faktor yang mendorong kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu:

1. Dampak fluktuasi nilai rupiah seiring peningkatan Fed Fund Rate yang dapat meningkatkan harga komoditas global di dalam negeri (a.l. Emas), serta harga komoditas berbahan baku impor, seperti pakan ternak ayam ras.
2. Perbaikan ekonomi dunia yang mendorong peningkatan harga komoditas global,
3. Dampak dari kenaikan harga kelompok administered prices terhadap komponen biaya beberapa komoditas (seperti tarif listrik pada sewa dan kontrak rumah) dan juga adanya kenaikan Pertamina.

Faktor yang menahan kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu:

1. Perkembangan nilai tukar stabil sebagai upaya stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia dengan mengoptimalkan peran TPID di daerah.
2. Ekspektasi masyarakat terjaga

B. Volatile Food

Volatile food diperlukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan di pasar. Jika memang perlu ada kenaikan harga dari suatu komoditas pangan, misalnya beras, jagung, dan lainnya, kenaikan yang timbul masih dalam taraf yang wajar. Jika tidak begitu, gejolak harga pangan yang tiba-tiba dan ekstrem akan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan masyarakat. Pasalnya, ketahanan pangan secara langsung akan berdampak pada ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Faktor yang mendorong kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu pengiriman pasokan beras Jawa Timur secara langsung ke luar daerah dari sentra produksi, sehingga tidak berdampak positif pada penambahan supply di dalam Jawa Timur. Faktor yang menahan kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu:

1. Berbagai program yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan (operasi pasar, bantuan ongkos angkut, serta gerai stabilisasi harga)
2. Penetapan HET untuk beberapa komoditas pangan strategis (termasuk gula dan beras) oleh Kementerian Perdagangan.

C. Administered Prices

Administered Price adalah harga suatu barang atau jasa yang beredar di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah. Dalam kasus ini, pemerintah akan menentukan kebijakan atas harga dasar suatu barang atau jasa berdasarkan keadaan ekonomi atau faktor lainnya. Komoditas yang biasanya diatur harga jualnya adalah minyak, beras, tarif dasar listrik, bahan pangan, dan lain sebagainya. Tidak hanya pada harga jual, administered price juga berlaku untuk harga sewa. Jadi, harga sewa suatu barang atau jasa juga bisa tetap stabil. Faktor yang mendorong kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu: 1. Berlanjutnya penyesuaian harga rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai dan PPN rokok 2. Potensi kenaikan harga BBM (subsidi dan non subsidi) seiring kenaikan perkembangan harga minyak dunia yang menunjukkan peningkatan. 3. Kenaikan permintaan tiket berbagai angkutan saat libur long weekend dan keagamaan. Faktor yang menahan kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Blitar yaitu tambahan subsidi energi pada APBN yang dapat menambah ruang stabilisasi tarif energi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan dapat mempengaruhi inflasi di Kabupaten Blitar khususnya di sepanjang Triwulan I 2021 adalah sebagai berikut: 1. Adanya potensi kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan perkembangan harga emas murni yang menunjukkan tren peningkatan; 2. Risiko penurunan produksi dan kualitas komoditas hortikultura di tengah cuaca yang masih belum kondusif; 3. Berlanjutnya penyesuaian harga aneka jenis rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai 2021. 4. Potensi kenaikan harga BBM seiring kenaikan harga minyak dunia. Meskipun demikian, tekanan harga diperkirakan dapat tertahan oleh beberapa faktor berikut: 1. Tidak adanya kenaikan listrik sampai dengan Maret 2021. 2. Terjaganya ekspektasi masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi yang terkendali dapat memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, distribusi pendapatan, serta peningkatan investasi produktif di daerah. Dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Kabupaten Blitar melakukan beberapa program, meliputi: 1. Penguatan Kelembagaan Dalam upaya penguatan kelembagaan, TPID Kabupaten Blitar pada Triwulan I 2020 telah melaksanakan beberapa rapat koordinasi. Adapun pelaksanaan rapat koordinasi Kabupaten Blitar pada Triwulan I - 2021, antara lain sebagai berikut: NO Tanggal Penetapan Kegiatan/Pokok Bahasan Keterangan (Kebijakan Yang Dikeluarkan) 1 6 Januari 2021 Undangan Rapat mengenai penindak lanjutan Program Intermediatory Supply-Demand yang ditetapkan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur - 2 5 Maret 2021 Rapat Koordinasi Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID. Mengadakan beberapa perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga atau instansi luar daerah sebagai berikut: 1. Perjanjian kerjasama antara Food Station BUMD Provinsi DKI Jakarta dengan koperasi Putera Blitar tentang Komoditi Telur. 2. Perjanjian kerjasama antara Induk Koperasi Pasar (Inkopas) Jabodetabek dengan koperasi Putera Blitar tentang Komoditi Telur. 3. Perjanjian Kerjasama antara Bulog Kalimantan Selatan dengan Koperasi Putera Blitar tentang komoditi jagung untuk peternakan Blitar. 4. Perjanjian Kerjasama antara Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Blitar tentang Komoditi Jagung untuk peternakan di Blitar. 5. Perjanjian Kerjasama antara Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Blitar tentang Komoditi Telur. 6. Perjanjian Kerjasama antara Dewan Koperasi Daerah dengan Kabupaten Blitar tentang Pembinaan Kelembagaan Koperasi. 7. Perjanjian Kerjasama antara Puspa Agro (BUMD Prop Jatim) dengan Kabupaten Blitar (Koperasi Putra Blitar) tentang pengadaan jagung sebagai bahan pakan ternak. Sedangkan dalam Peninjauan adalah : 1.

Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Koperasi Putera Blitar tentang Komoditi telur serta Koperasi Unggas sejahtera Komoditi ayam pedaging. Dengan tujuan pemulihan sektor ekonomi di masa pandemi covid 19 kami dari tim pengendalian inflasi melakukan inisiasi agar daya beli masyarakat tidak rendah. 3 8 Maret 2021 rapat koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Kanigoro, Rapat dipimpin oleh Bupati Blitar Rini Syarifah. Pemerintah daerah akan mengerahkan segala upaya untuk mengendalikan inflasi terkait lonjakan harga cabai. 4 9 Maret 2021 Rapat Koordinasi Penjajakan Awal Kerjasama Antar Daerah (KAD) Komoditas Telur Ayam Ras Antara TPID Kab. Blitar Dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara dan kota Tarakan) Membuat kerjasama perdangangan antar daerah yaitu kaltara dengan Jawa Timur dengan adanya penandatanganan kerjasama antar daerah G to G (Government to Government) antara Bupati Blitar dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan antara bupati Blitar dengan Wali kota Tarakan setelah berjalannya kerjasama B to B (Business to Business) 5 16 Maret 2021 Rapat Koordinasi Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Dengan OPD terkait di Kabupaten Blitar Dalam rangka mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui stabilitas harga komoditas serta peningkatan dan perluasan digitalisasi ekonomi dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi daerah (TP2DD). Terdapat tiga pokok bahasan yakni Perkembangan dan Proyeksi Ekonomi Tahun 2021, Pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Evaluasi dan Rencana Program Kerja TPID di Masing-masing Kota/Kab Tahun 2021 6 22 Maret 2021 Rapat Koordinasi Penjajakan Kerja Sama dengan Kab/Kota Bima Komoditas Jagung, Menindaklanjuti perihal surat dari Putera Blitar Nomor : 154/KPB/III/2021 Perihal kenaikan Harga Pakan Ternak dan Turunnya Harga Telur - 2. Pengelolaan produksi, distribusi dan konektivitas A. Pengembangan Klaster Ketahanan Pangan Pengembangan klaster ketahanan pangan di Kabupaten Blitar merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dalam rangka pengendalian inflasi di daerah khususnya untuk pengendalian harga. Pengembangan klaster ketahanan pangan di Kabupaten Blitar tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyediaan komoditas dalam rangka menjaga kecukupan pasokan ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, daging ayam dan telur ayam ras, mengingat Kabupaten Blitar merupakan wilayah agraris dengan hasil utama adalah beras, ayam dan telur ayam ras. Produksi beras Kabupaten Blitar tahun 2019 sebesar 380.688 ton dengan luas panen sebesar 60.297 ha, sehingga jika dihitung tingkat produktivitasnya mencapai 631,1 kuintal/ha. Produksi padi Kabupaten Blitar pada musim tanam pertama tahun 2021 (Januari-Maret) mencapai 171.980 ton dengan luas panen 26.844 ha, dengan produktivitas 64 kuintal/ha. Diharapkan berbagai upaya pengendalian ketahanan pangan yang dimonitor secara gabungan baik oleh pemerintah daerah maupun TNI/Polri dapat menjaga stabilitas produksi maupun harga. Kabupaten Blitar merupakan penghasil utama daging dan telur ayam ras ayam di tingkat nasional. Populasi ayam pedaging Kabupaten Blitar mencapai lebih dari 4 juta ekor dengan produksi daging sebesar 15.226,788 ton pada tahun 2020. Sedangkan populasi ayam petelur ayam ras Kabupaten Blitar mencapai lebih dari 16 juta ekor dengan produksi telur ayam ras sebesar 171.574,409 ton di tahun 2019, atau jika dikalkulasi produktivitas hariannya mencapai lebih dari 448 ton/hari. Produksi telur ayam ras Kabupaten Blitar pada Triwulan I tahun 2021 mencapai 42.588,254 ton, atau sebesar 26,358 persen dari capaian tahun lalu. Dengan tingkat produksi Triwulan I yang relatif baik, maka diharapkan produksi telur ayam ras di tahun 2021 bisa melebihi capaian tahun 2020. B. Pemantauan Harga Ketersediaan Pasokan Komoditas TPID Kabupaten Blitar melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat melalui dua cara, yakni pemantauan secara tidak langsung dan pemantauan secara langsung. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui bantuan aplikasi sistem informasi harga yang telah dikembangkan oleh pemerintah, yakni sistem informasi ketersediaan dan

perkembangan harga pokok di Jawa Timur (Siskaperbapo) serta sistem informasi pangan Kabupaten Blitar. Siskaperbapo dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Kabupaten Blitar secara rutin menyetorkan data informasi harga untuk 2 (dua) pasar Kabupaten yakni pasar Sutojayan dan pasar Wlingi untuk 28 komoditas mulai harga beras, daging, telur ayam ras, minyak goreng hingga harga pupuk. Sedangkan (sistem informasi pangan) SIP Kabupaten Blitar dikembangkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar untuk memantau harga ditingkat produsen hingga pasokan atau ketersediaan komoditas-komoditas pertanian yang diupdate secara mingguan oleh petugas teknis lapangan (PPL). Pemantauan harga selanjutnya adalah pemantauan harga secara langsung di lapangan. Pada momen tertentu atau pada saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat atau komoditas utama yang memiliki bobot inflasi tinggi, TPID Kabupaten Blitar bersama Tim Satgas Pangan antara lain : Kepolisian, TNI, dan OPD terkait melakukan pemantauan harga dan kecukupan pasokan komoditas secara langsung ke sejumlah pasar, pedagang, distributor di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilakukan pada saat tahun baru. Dimana pada saat tersebut, ketersediaan barang dan harga kebutuhan pokok masyarakat cenderung mengalami kenaikan. Beberapa pasar dan distributor utama yang menjadi objek pemantauan TPID Kabupaten Blitar adalah Pasar Wlingi, Pasar Sutojayan, Pasar Kademangan, Pasar Srengat dan Pasar Pathok Kecamatan Ponggok. Data hasil pemantauan digunakan sebagai acuan dalam perumusan rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah. Manfaat dari kegiatan tersebut antara lain adalah untuk mendeteksi ada tidaknya indikasi penimbunan sekaligus melakukan sosialisasi kepada pedagang dan distributor resiko bagi penimbun bahan pangan. Dengan kehadiran TPID Kabupaten Blitar bisa memberikan efek psikologis kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah ikut hadir di lapangan dalam memberikan solusi apabila terjadi lonjakan harga.

C. Pemantauan Jalur Distribusi Komoditas Dalam upaya untuk menjaga distribusi komoditas pasokan pangan di Kabupaten Blitar tetap aman, serta untuk memastikan jalur utama yang dilalui kendaraan bermuatan komoditas pangan tetap lancar, TPID Kabupaten Blitar melalui Dinas Perhubungan melaksanakan operasi pemantauan jalur distribusi komoditas pasokan pangan. Operasi ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, bahkan pada saat menjelang dan pasca tahun baru, operasi ini juga dilakukan secara gabungan dengan melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, aparat TNI dan Kepolisian. Operasi gabungan tersebut dilakukan untuk memantau kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan utamanya angkutan barang pembawa bahan pokok, serta mendokumentasikan jenis muatan yang keluar/masuk Kabupaten Blitar.

3. Regulasi dan monitoring Berbagai inovasi kebijakan pemerintah Kabupaten Blitar turut berperan besar dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Blitar. Beberapa inovasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mendukung pengendalian inflasi adalah sebagai berikut :

A. Upaya daya dukung ASN dalam menjaga stabilitas harga dan pemberdayaan petani lokal. berdasarkan Surat Edaran Penyampaian Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pengadaan Beras untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan sasaran PNS Kabupaten Blitar Eselon II dan III

B. Undangan Rapat mengenai penindak lanjutan Program Intermediatory Supply-Demand yang ditetapkan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur

C. Rapat Koordinasi Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID.

D. Rapat Koordinasi Penjajakan Awal Kerjasama Antar Daerah (KAD) Komoditas Telur Ayam Ras Antara TPID Kab. Blitar Dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara dan kota Tarakan)

E. Rapat Koordinasi Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Dengan OPD terkait di Kabupaten Blitar

F. Permohonan fasilitasi Kepada Bank Indonesia terkait akomodasi perwakilan koperasi yang akan melakukan kerjasama dengan DKI Jakarta berdasarkan Surat dari Bupati Blitar ke Kepala Kantor Perwakilan BI Kediri Tanggal 18 Februari 2020 terkait Fasilitasi Perdagangan Antar

Daerah, permohonan fasilitasi akomodasi bagi perwakilan koperasi telur, cabe, ayam pedaging, serta olahan daging dan susu ke DKI Jakarta dengan sasaran Perwakilan anggota koperasi telur, cabe, ayam pedaging serta olahan daging dan susu. G. Rapat Koordinasi Penjajakan Kerja Sama dengan Kab/Kota Bima Komoditas Jagung, Menindaklanjuti perihal surat dari Putera Blitar Nomor : 154/KPB/III/2021 Perihal kenaikan Harga Pakan Ternak dan Turunnya Harga Telur 4. Pemanfaatan kajian dan informasi Sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi inflasi, TPID Kabupaten Blitar telah memanfaatkan data perkembangan harga Siskaperbapo dan SIP. Data dan Informasi tersebut diolah dan dikaji sebagai dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan dalam pengendalian inflasi di daerah. Sebagai bahan evaluasi terhadap sistem informasi yang telah dikembangkan tersebut adalah: A. Siskaperbapo hanya menjangkau 2 pasar yang ada yakni pasar Wlingi dan pasar Sutojayan. Sehingga belum bisa mencerminkan kondisi riil daerah. Siskaperbapo merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga daerah hanya terwakili secara sampling oleh 2 pasar yang ada. Data ini terupdate secara manual (offline), sehingga masih menyulitkan dalam membuat pelaporan hariannya. B. Sistem informasi pangan Kabupaten Blitar yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, telah dikembangkan untuk menjangkau informasi mengenai harga ditingkat produsen, stok komoditas dan kebutuhan konsumsi masyarakat, namun informasi ini masih digali secara mingguan melalui tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Angka yang dikeluarkan merupakan angka rata-rata 22 kecamatan. C. Hibah sistem informasi harga pasar dari Kabupaten Sleman, diharapkan menjadi penyempurna aplikasi Siskaperbapo dengan memasukkan 13 pasar yang ada, bahkan kedepan perlu difikirkan untuk dapat menjangkau hingga pasar kecamatan dan desa. Aplikasi ini diharapkan dapat terintegrasi dengan Siskaperbapo sehingga update pelaporan ke tingkat provinsi dapat dilaksanakan secara simultan. D. Dalam rangka merangkum ketiga aplikasi yang telah ada, telah dikembangkan Sistem Informasi Deteksi Dini Inflasi oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Blitar pada 2021. Sistem ini akan mengimpor data-data yang telah ada pada ketiga aplikasi yang ada, untuk disuguhkan menjadi informasi penting, yang akan digunakan oleh TPID Kabupaten Blitar untuk merumuskan kebijakan secara cepat dan akurat. TPID sebagai pengendali inflasi daerah memerlukan informasi yang cepat namun akurat berbasis android. Dalam hal ini, keberadaan sektep TIPD yang memiliki operator khusus sangatlah penting, demi peningkatan kinerja TPID Kabupaten Blitar dimasa yang akan datang. 5. Pengendalian ekspektasi Komunikasi publik menjadi elemen penting dalam menginformasikan data, kebijakan dan kegiatan-kegiatan TPID. Tools ini juga sangat efektif dalam menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku ekonomi, sehingga inflasi di Kabupaten Blitar tetap terjaga dan terkendali dengan baik. Beberapa kegiatan komunikasi publik yang telah dilakukan TPID Kabupaten Blitar pada Triwulan I-2020 adalah sebagai berikut : A. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pada media elektronik, yaitu televisi dan radio. B. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pada website Pemerintah Kabupaten Blitar. Dampak kegiatan ini adalah tingkat keyakinan masyarakat yang meningkat terkait kecukupan persediaan stok sembako terutama menjelang dan pasca tahun baru.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Blitar turut berperan besar dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Blitar. Beberapa program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar yang efektif dalam menjaga dan mengendalikan inflasi terutama di Triwulan I 2021 adalah sebagai berikut : 1. Operasi Pasar Murni (OPM); 2. Operasi pemantauan jalur distribusi komoditas pasokan pangan; 3. Komunikasi publik (press release, penayangan iklan layanan masyarakat); 4. Pemantauan harga dan kecukupan pasokan / sidak komoditas secara

langsung ke sejumlah pasar, pedagang, distributor dan asosiasi di Kabupaten Blitar.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Blitar turut berperan besar dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Blitar. Beberapa program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar yang efektif dalam menjaga dan mengendalikan inflasi terutama di Triwulan I 2021 adalah sebagai berikut : 1. Operasi Pasar Murni (OPM); 2. Operasi pemantauan jalur distribusi komoditas pasokan pangan; 3. Komunikasi publik (press release, penayangan iklan layanan masyarakat); 4. Pemantauan harga dan kecukupan pasokan / sidak komoditas secara langsung ke sejumlah pasar, pedagang, distributor dan asosiasi di Kabupaten Blitar.

Sehubungan dengan capaian inflasi dan kendala yang terjadi di Triwulan I 2021 dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Blitar, TPID Kabupaten Blitar merekomendasikan beberapa hal dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi, diantaranya : 1. Penguatan Kelembagaan a. Meningkatkan koordinasi Anggota TPID Kabupaten Blitar baik level teknik maupun high level. b. Meningkatkan kinerja TPID Kabupaten Blitar melalui capacity building; 2. Produksi, Distribusi dan Konektivitas c. Pengembangan Kluster Ketahanan Pangan, Pengembangan kluster ketahanan pangan di Kabupaten Blitar tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyediaan komoditas dalam rangka menjaga kecukupan pasokan ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, daging ayam dan telur ayam ras d. Secara terus menerus memantau perkembangan harga dan kelancaran pasokan serta ketersediaan stok komoditas pokok, khususnya beras. Pemantauan dapat dilakukan secara on site atau kunjungan langsung ke pasar dan distributor atau secara offsite yaitu melalui aplikasi Siskaperbapo. 3. Pengendalian ekspektasi. Menerbitkan press release serta mempublikasikan capaian inflasi dan perkembangan harga komoditas strategis serta himbauan kepada masyarakat agar berbelanja dengan bijak sebagai salah satu upaya moral suasi. 4. Pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat secara umum, sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan juga mengakibatkan melambatnya perputaran produk pertanian dan UMKM. Rekomendasi kebijakan TPID Kabupaten Blitar sebagai daerah sentra produksi yang terdampak covid-19 adalah perluasan pemasaran produk Kabupaten Blitar dengan cara digitalisasi dan peningkatan kerjasama antar daerah.